



Gunarto, salah satunya. Warga Dusun Banjarsari, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, ini tidak mengetahui siapa anggota DPRD Sleman yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) II (Ngaglik, Pakem, dan Cangkringan).

Saking parahnya, Gunarto bahkan tidak mengetahui satu nama di antara 50 anggota DPRD Sleman periode 2014-2019. Apalagi, anggota DPRD DIJ atau DPR RI. Pria 56 tahun ini pun akhirnya pesimistis dengan manfaat keberadaan anggota dewan.

"Ada atau tidaknya anggota

dewan tidak mengubah apa pun. Kebijakannya tidak sampai ke masyarakat kecil," ketus Gunarto saat berbincang dengan *Radar Jogja* perihal harapannya terhadap Pemilihan Legislatif (pileg) 2019 kemarin (16/4).

Karena itu, Gunarto tidak menaruh harapan apa pun terhadap

caleg terpilih periode 2019-2024. *Toh*, anggota dewan periode sebelumnya tidak memberikan dampak.

Berbeda dengan Gunarto, Kepala Desa Sumberharjo Lekta Manuri punya pandangan tersendiri terhadap kinerja DPRD Sleman selama hampir lima tahun

terakhir ini. Menurutnya, wakil rakyat periode 2014-2019 cukup aspiratif. Itu ditandai dengan berbagai program kedewanan. Seperti *public hearing* dan *reses*.

"Hal itu menjadi salah satu indikator dalam aktualisasi kebijakan pemerintah," ucapnya.

Kendati begitu, Lekta berharap anggota DPRD Sleman periode 2019-2024 adalah sosok-sosok yang mumpuni. Yakni, sosok-sosok yang mampu mewakili konstituennya.

"Dan bisa mewujudkan kelembagaan dewan yang berkualitas," harapnya.

Dari Kota Jogja juga muncul harapan serupa. Lurah Kelurahan Kadipaten Sri Ernawati menilai, kinerja anggota DPRD Kota Jogja periode 2014-2019 cukup baik. Tidak sedikit di antara mereka yang langsung turun tangan ketika ada persoalan.

"Semoga anggota dewan yang terpilih nanti memegang amanah dengan baik," harapnya.

Dalam kontestasi pileg tidak semua caleg bakal terpilih. Pun dengan caleg petahana. Dari itu, caleg petahana harus menjalankan tanggung jawab hingga akhir periode. Meski, seandainya pada

Pileg 2019 tidak terpilih lagi.

"Caleg *incumbent* harus menyelesaikan program yang telah disusun sampai akhir masa jabatan. Jangan absen dari tugas kedewanan setelah tahu tidak terpilih," kata Direktur LSM Perempuan Penggerak Ekonomi Rakyat (Pukat) Gunungkidul Rino Caroko.

Dalam penilaiannya, Rino melihat, caleg petahana aktif kembali mendekati konstituennya selama dua tahun terakhir. Artinya, mereka baru turun ke lapangan setelah tiga tahun menjabat. Pendekatan itu dilakukan agar mereka terpilih kembali.

"Jadi, pilihlah caleg yang bakal memperjuangkan konstituen dan rakyat selama mereka menjabat," pesannya.

Kepala Desa Kampung Suparna punya harapan serupa. Dia meyakini pemilih sudah semakin cerdas. Mereka bakal memilih caleg yang benar-benar bakal memperjuangkan konstituen. Kendati begitu, Suparna tetap ketar-ketir. Lantaran tidak sedikit pemilih di wilayah yang dipimpinya berusia lanjut. Khawatirnya, mereka salah mencoblos.

"Bisa jadi, caleg yang selama

ini tidak dikenal justru menang," katanya khawatir.

Dari Kabupaten Bantul, harapan terhadap peran anggota dewan juga sangat tinggi. Mengingat, anggota dewan punya fungsi yang sangat komplet. Dengan fungsi penganggaran, misalnya, anggota dewan bisa berbicara banyak. Bahkan, anggota dewan bisa mengusulkan berbagai program kerakyatan. Atau program yang dibutuhkan rakyat. Namun, sebagian warga belum merasakan manfaatnya.

Di Desa Parangtritis, Kretek, Bantul, contohnya. Petani tetap harus berjuang melawan banjir ketika musim penghujan tiba. Sebaliknya, mereka harus mampu bertahan saat musim kemarau datang.

"Hingga kini belum ada wakil rakyat yang mampu mengatasi," keluh Lurah Parangtritis Karjana.

Padahal, kata Karjana, ada 167 hektare lahan pertanian di wilayah Parangtritis. Lahan seluas itu menjadi tumpuan hidup sekitar 1.600 petani.

"Mudah-mudahan pileg kali ini ada (caleg terpilih) yang mampu mengatasinya," harapnya. (har/cr8/gun/cr6/zam/fj)

## DPRD Kota Jogja Hanya Mampu Prakarsai 9 Raperda

LEGISLASI menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja anggota dewan. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun, jika dipersempit, indikator kinerja legislasi itu terlihat dari berapa peraturan daerah (perda) yang diprakarsai legislatif. Lantaran prakarsa legislatif itu merepresentasikan tingkat kepedulian anggota DPRD terhadap payung hukum yang dibutuhkan.

Koordinator Pengurus Harian Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba

**IN SIGHT**

menilai, DPRD saban tahun setidaknya mampu menghasilkan empat perda insiatif. Di mana perda-perda itu berasal dari empat komisi di DPRD. Namun, faktanya tidak sedikit DPRD kabupaten/kota di DIJ yang menghasilkan kurang dari empat perda. Artinya, empat komisi yang punya bidang pengawasan tidak bekerja maksimal.

DPRD Kota Jogja, misalnya. Dalam kurun 2015 hingga April 2019 telah menghasilkan 54 perda. **→ Baca DPRD... Hal 7**

## DPRD Kota Jogja Hanya Mampu Prakarsai 9 Raperda

Sambungan dari hal 1

Namun, perda prakarsa legislatif yang dihasilkan minim. Hanya sembilan perda.

Menurut Kamba, sapaannya, kinerja anggota DPRD Kota Jogja belakangan kerap angin-anginan. Salah satu indikatornya, anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna (rapur) minim. Bahkan, beberapa rapur pengambilan keputusan kerap ditunda lantaran tidak memenuhi quorum.

Indikator lainnya adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) 2019. Pada 2019, DPRD Kota Jogja hanya membahas 11 raperda. Jumlah ini turun drastis dibanding 2018.

"Pada tahun lalu 24 raperda," kritiknya.

Dari catatan *Radar Jogja*, pembahasan raperda di DPRD Kota Jogja tidak semuanya lancar. Pada 2017, misalnya, DPRD Kota Jogja sempat disorot. Lantaran hasil pembahasan Pansus Raperda Ekonomi Kreatif ditolak Biro Hukum Setprov DIJ. Saat itu, Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santosa menjelaskan, penolakan karena materi dalam raperda belum memenuhi untuk diatur dalam perda. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan. Rumusan dalam raperda belum terperinci. Objek pengaturannya hingga apa yang akan diatur belum jelas.

"Semisal untuk sektor industri, apa yang mau dikembangkan pengembangannya belum diajur jelas," ujarnya. (Radar Jogja 8 Juli 2017). Akhirnya, DPRD Kota Jogja tidak meneruskan proses pembahasan.

Tak berselang lama, Biro Hukum DIJ juga menolak Raperda Hak Penyandang Disabilitas karena dinilai hanya *copy paste* dari UU nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hasil evaluasi dari Biro Hukum Setprov DIJ, materi dalam Raperda Hak Penyandang Disabilitas Kota Jogja masih terdapat beberapa pengulangan dari UU Penyandang Disabilitas.

"Raperda (disabilitas) Kota Jogja masih *copy paste* UU, harusnya perda itu harus implementatif dan disesuaikan dengan kondisi daerah, jangan hanya *copy paste*," jelas Dewo. (Radar Jogja 9 Agustus 2017).

Padahal, Raperda Hak Penyandang Disabilitas merupakan inisiatif DPRD Kota Jogja sejak 2013. Berbagai kalangan disabilitas pun sudah memberikan masukan. Setelah lima tahun, akhirnya pada 2018 lalu DPRD

Kota Jogja bersama Pemkot Jogja menyetujui diadukan perda.

Sekretaris DPRD Jogja Prima Hastawan membenarkan bahwa anggota dewan periode 2014-2019 telah menghasilkan 54 perda. Sebanyak sembilan di antaranya merupakan prakarsa legislatif.

Berbeda dengan Kota Jogja, DPRD Sleman bisa konsisten menjalankan fungsinya. Kasubag Fasilitasi Hukum Sekretariat DPRD Sleman Sony Wibisono menyebut DPRD Sleman membahas 25 raperda pada 2018. Sebanyak empat di antaranya prakarsa DPRD.

Kendati begitu, ada satu raperda yang masih menjadi pekerjaan rumah. Pembahasan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) No 9/2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 hingga sekarang belum selesai.

Yang menarik, banyaknya raperda yang dibahas berbanding lurus dengan jumlah kunjungan kerja (kunker). Menurut Sony, pembahasan satu raperda mengharuskan kunker minimal dua kali.

"Untuk komparasi dan konsultasi. Tapi, kadang kunker sampai tiga kali," sebutnya.

Seperti Kota Jogja, DPRD Gunungkidul juga miskin prakarsa.

Pada 2019, misalnya, ada 15 raperda yang masuk Propemperda. Tapi, mayoritas raperda inisiasi eksekutif. Legislatif hanya memprakarsai satu raperda.

"Semoga bisa diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan," ucap Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul Imam Taufiq mengaku puas dengan capaian 2018. Meski, DPRD hanya menelurkan 15 perda baru.

"Ini menunjukkan kinerja dewan tidak turun, meski 2018 bisa dibidang mendekati tahun politik," klaimnya.

Di lain tempat, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Bantul Heru Sudibyo menyebut ada 14 raperda yang dibahas pada 2019. Jumlah ini turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kendati begitu, politikus Partai Golkar ini berdalih Bapemperda tidak mengejar kuantitas. Melainkan kualitas. Toh, DPRD konsisten memprakarsai empat raperda setiap tahunnya.

Sekretaris DPRD Bantul Prapta Nugraha mengungkapkan hal senada. Menurutnya, berbagai anggota kedewanan berjalan maksimal. Juga sesuai dengan agenda yang dijadwalkan. Termasuk pembahasan raperda. (dwi/har/gun/cr6/zam/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005